



Penerapan Paradigma Whole of Government dalam Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Najla Syifa Maharani¹, Susi Hardjati²

¹Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: najlaranii15@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised December 15, 2024

Accepted December 26, 2024

Available online January 31, 2025

Kata Kunci:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Perpustakaan Keliling; Whole of
Government

Keywords:

Library and Archives Service; Mobile
Library; Whole of Government



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan paradigma *Whole of Government* (WoG) dalam program Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara mendalam. Data primer diperoleh melalui pengamatan selama pelaksanaan magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, serta wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Dinas dan pihak terkait. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam aspek WoG – koordinasi antar organisasi, *sharing* informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas organisasi, sarana dan prasarana, serta penganggaran – telah diterapkan dalam program Perpustakaan Keliling. Koordinasi yang baik dengan sekolah dan desa memastikan pelaksanaan program yang efektif, sementara komunikasi internal dan eksternal meningkatkan efisiensi operasional. Kapasitas organisasi didukung oleh SDM yang kompeten dan pelatihan khusus, sedangkan fleksibilitas organisasi

diwujudkan melalui gaya kepemimpinan berbagi yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Namun, kendala ditemukan pada aspek prasarana, seperti akses jalan dan koneksi internet di daerah terpencil, yang memengaruhi optimalisasi layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan WoG mendukung keberhasilan program Perpustakaan Keliling dalam meningkatkan literasi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan teknis yang perlu diatasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengelolaan program literasi berbasis komunitas dengan pendekatan WoG.

ABSTRACT

This study aims to identify the implementation of the *Whole of Government* (WoG) paradigm in the Mobile Library program implemented by the Sidoarjo Regency Library and Archives Service. This program is designed to increase public interest in reading as a response to the low level of literacy in Indonesia, including in Sidoarjo Regency, which has a relatively low Community Literacy Development Index compared to other areas in East Java. The WoG paradigm, which focuses on cross-sector coordination and collaboration between stakeholders, is applied to optimize program implementation. This study uses a descriptive qualitative method with an observation and in-depth interview approach. Primary data were obtained through observations during the internship at the Sidoarjo Regency Library and Archives Service, as well as semi-structured interviews with the Head of the Service and related parties. Secondary data were collected through a literature study of relevant literature. The data analysis technique used the Miles and Huberman model, which involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the six aspects of WoG – inter-organizational coordination,

information sharing, organizational capacity, organizational flexibility, facilities and infrastructure, and budgeting – have been implemented in the Mobile Library program. Good coordination with schools and villages ensured effective program implementation, while internal and external communication improved operational efficiency. Organizational capacity was supported by competent human resources and specialized training, while organizational flexibility was realized through a shared leadership style that encouraged innovation and collaboration. However, obstacles were found in infrastructure aspects, such as road access and internet connection in remote areas, which affected service optimization. This study concluded that the implementation of WoG supported the success of the Mobile Library program in improving community literacy, although there were still technical challenges that needed to be overcome. These findings provide theoretical and practical contributions in the management of community-based literacy programs with the WoG approach.

1. PENDAHULUAN

Membaca merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk melakukan transfer data dari bahan bacaan yang dibaca dan dapat mengubah sikap seseorang untuk kemudian dikonversi dalam bentuk kebijakan, (Herwina, 2020 :112). Berdasarkan pengertian tersebut maka kegiatan membaca bukan hanya sekedar melihat teks secara visual tanpa adanya kelanjutan tindakan, melainkan kegiatan membaca memiliki peranan dalam pengubahan sikap manusia berdasarkan hal yang dibaca. Membaca memiliki peranan terhadap kehidupan individu dalam masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh Herwina, (2020 :112), yang menyatakan ciri suatu Masyarakat yang telah maju secara mayoritas adalah kaum Masyarakat dengan kebutuhan informasi yang tinggi. Berdasarkan ungkapan tersebut maka kegiatan membaca merupakan sebuah kegiatan kognitif yang perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan seiring dengan tumbuh kembang manusia. Hal tersebut dipaparkan oleh Shofuassamawati, (2014 :50), yang menyatakan membaca merupakan kegiatan kognitif dalam diri manusia dikarenakan melibatkan kemampuan analitis, sintesi, dan kemampuan dalam mengevaluasi bahan bacaan. Maka dari itu membaca merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan pendidikan manusia baik di dalam maupun di luar sekolah.

Harapan pemerintah dan masyarakat mengenai kemampuan membaca dan minat baca ideal berkontradiksi dengan kenyataan. Menurut pernyataan Suhadhan, dkk, (2023 :1056), Indeks Literasi Negara Indonesia berada di urutan ke-62 dalam penelitian tahun 2019 oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di 70 negara di seluruh dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks aktivitas literasi membaca di Indonesia pada tahun 2024 masih rendah, yaitu 38,1%. Angka minat baca dan literasi masyarakat yang rendah di Indonesia tersebut kemudian menyebabkan adanya pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* di Indonesia. HDI di Indonesia merupakan sebuah indeks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni: Harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan minat dan kemampuan baca masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Masyarakat berada pada angka 75,02, yang dipaparkan bahwa dalam standar dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah masyarakat usia 7 tahun, pada tahun 2024 meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Minat baca masyarakat yang rendah menyebabkan berbagai akibat buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hal tersebut disampaikan pada penelitian Ipung dan Anisa, (2021), yang menyatakan bahwa pada studi yang dilakukan oleh Jurnal Universitas Indonesia bahwa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia pada era ini menyebabkan terjadinya krisis kemampuan berpikir kritis oleh para remaja. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tersebut menurut Rahmadanita, (2022), menyebabkan terjadinya: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai urgensi pendidikan dilakukan dikarenakan tidak ada penanaman budaya cerdas dalam diri masyarakat; (2) Rendahnya atau bahkan ketidakhadiran kesadaran sosial masyarakat di sebuah masa sebagai konsekuensi rendahnya minat baca masyarakat; (3) Kesukaran pembangunan negara Indonesia menjadi negara maju dikarenakan output atau luaran generasi masyarakat Indonesia dengan SDM yang tidak suka membaca atau mencerna informasi; (4) Meningkatnya angka kriminalitas dikarenakan pendidikan yang rendah sedangkan orientasi masyarakat terhadap uang tidak berubah; (5) Kemiskinan masyarakat yang semakin parah diakibatkan kualitas masyarakat yang rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri kerja; (6) Sensitivitas sosial masyarakat yang tidak terarah dikarenakan kemampuan mencerna dan menerima sebuah informasi yang rendah, dan berpotensi untuk menimbulkan terjadinya tenggang rasa dan tenggang sosial bahkan konflik. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka diperlukan tindak penyelesaian untuk menangani masalah tersebut. Salah satu pihak yang memiliki peranan dalam mengentaskan permasalahan tersebut dengan berbagai program atau kebijakan yang dilahirkan adalah Pemerintah Daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Syarif Bando dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2021), yang menyatakan bahwa rendahnya indeks literasi masyarakat Indonesia merupakan hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan program peningkatan literasi untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya minat baca masyarakat adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berdasarkan data dari BPS 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Kabupaten Sidoarjo berada pada angka 54,830. Angka tersebut terpaut jauh dengan Ibukota Jawa Timur, yakni Kota Surabaya yang menunjukkan angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surabaya yang berada pada angka 84,32. Hal tersebut didapatkan dari data Perpustakaan Nasional, Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023/ *National Library, Final Report of the Community Literacy Development Index Study 2023*. Permasalahan Pembangunan Literasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo berusaha diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Layanan Mobil Baca Keliling di Kabupaten Sidoarjo. Penyelenggaraan Mobil Perpustakaan Keliling dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun

Whole of Government merupakan paradigma yang muncul dan diinisiasi oleh Tony Blair yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 1997. Paradigma tersebut muncul ketika pemerintah Inggris mengalami kesulitan dalam menghadapi wicked problem atau sebuah permasalahan yang ketika dicari penyelesaiannya akan muncul masalah baru yang lain. Menurut Christensen, Legreid, (2017), permasalahan tersebut muncul karena adanya kelemahan pada

koordinasi lembaga-lembaga publik di Inggris. *Whole of Government* merupakan hal yang baru pada pemerintahan negara-negara maju di dunia, namun dewasa ini paradigma *Whole of Government* menjadi topik perbincangan hangat pada obrolan mengenai pemerintahan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Tom, dan Legreid, (2017 :1059), *Whole of Government* merupakan sebuah tindak respon dari adanya gejala disagresi, devolusi struktural, dan fragmentasi sebagai akibat dari penerapan *New Public Management (NPM)*. Menurut Ling dalam Wibowo, (2022 :26-27), menyatakan bahwa terdapat enam aspek *Whole of Government* yakni: (1) Koordinasi antar organisasi, hal ini berbicara mengenai koordinasi yang dilakukan oleh berbagai tim dalam melakukan kegiatan, membentuk desain program, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai target kebijakan; (2) *Sharing informasi*, hal ini berbicara mengenai kesiapan tim yang berkaitan dengan alur komunikasi untuk melaksanakan kegiatan yang terencana dan terstruktur serta mencapai tujuan kegiatan; (3) *Kapasitas Organisasi*, hal ini mengenai kompetensi masing-masing anggota organisasi yang berkaitan dengan tercapainya tujuan organisasi. *Kapasitas organisasi* merupakan variabel yang meninjau tingkat kemampuan anggota organisasi dalam membentuk tim kerja yang efisien; (4) *Fleksibilitas organisasi*, variabel ini merupakan hal yang berbicara mengenai bentuk kepemimpinan dalam organisasi yang berbentuk *shared leadership*, yang kemudian menginisiasi adanya metode baru dalam pekerjaan atau inovasi-inovasi, serta pemusatan alokasi sumber daya sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota organisasi; (5) *Sarana prasarana*, merupakan aspek *WOG* yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, serta menunjang kegiatan mobilisasi anggota, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dalam menunjang segala kegiatan kerja yang dilakukan oleh organisasi; (6) *Budget atau keuangan* merupakan aspek yang berkaitan dengan pola penganggaran untuk pembelanjaan sarana dan prasarana demi kelangsungan kerja sebuah organisasi, hal ini ketika diimplementasikan berkaitan dengan akomodasi, persiapan materi koordinasi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan secara materi untuk menunjang kegiatan tim dalam sebuah organisasi. Aspek-aspek *WOG* yang dipaparkan di atas merupakan aspek-aspek yang diperlukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan perpustakaan keliling merupakan salah satu program yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Sidoarjo baik dilaksanakan di lembaga formal yakni sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan lembaga non-formal yakni perpustakaan keliling yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. *WOG* atau paradigma *Whole of Government* beserta dengan enam aspek di dalamnya merupakan instrument yang memaparkan mengenai kinerja antar organisasi dalam mencapai sebuah tujuan beserta dengan hal-hal yang dibutuhkan. *Whole of Government* merupakan bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayan penyelesaian masalah dalam pelayanan publik dengan menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, dan kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu lebih singkat (*Modul Pelatihan Dasar CPNS, Whole of Government, LAN RI*,

2017). Penelitian dengan judul serupa yang menggunakan paradigma Whole of Government sebagai variable penelitian dilakukan oleh Wibowo, (2022), yang membahas mengenai penerapan paradigma WoG dalam penyiapan penlok pengadaan tanah kepentingan umum di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat keenam aspek WoG yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah dalam melakukan 55 Penlok pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Jawa Tengah dan dari keenam aspek tersebut keseluruhan memberikan sumbangsih, dorongan, dan dukungan yang positif menuju terwujudnya pelayanan publik yang mumpuni.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut maka didapatkan pernyataan bahwa terdapat gap antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni pada studi kasus yang dikaji di mana pada penelitian terdahulu objek yang dikaji adalah kegiatan Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah Kepentingan Umum di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini mengkaji pada kegiatan peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui program Perpustakaan Keliling. Perbedaan penelitian tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan pada ruang penelitian mengenai peranan penerapan keenam aspek WOG dalam pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat yang melibatkan peranan stakeholder yakni pihak masyarakat secara langsung. Berangkat dari uraian penelitian terdahulu dan gap penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penerapan WoG dalam peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Sidoarjo oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo melalui program Perpustakaan Keliling.

2. METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode deskriptif pada analisis data. Penelitian menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui metode observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan peneliti selama melakukan magang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode wawancara dilakukan dengan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari kajian literatur terdahulu yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini sebagai penguat data primer. Penggunaan kedua jenis data yakni sekunder dan primer dalam penelitian ini menjadi kolaborasi dan memperkuat hasil penelitian mengenai penerapan paradigma Whole of Government dalam penyelenggaraan program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dalam bentuk wawancara semi struktur dengan menggunakan instrumen berupa lembar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Tujuan penggunaan wawancara semi struktur pada kegiatan penelitian ini adalah: (1) Menggali informasi yang mendalam pada narasumber, dikarenakan pertanyaan pada wawancara jenis ini bersifat fleksibel yang artinya memudahkan peneliti dalam melakukan eksplorasi lebih dalam pada pernyataan yang disampaikan oleh narasumber; (2) Penggabungan struktur dan fleksibilitas, hal ini dikarenakan wawancara jenis ini merupakan bentuk

penggabungan antara wawancara struktur dan wawancara bebas, sehingga peneliti tetap dapat menggali informasi mendalam pada topik utama, dan mendapatkan kebebasan untuk mengeksplorasi jawaban dari narasumber. Wawancara dilaksanakan secara langsung pada tanggal 19 Desember 2024, di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan observasi dilakukan selama lima bulan. Observasi dilakukan dalam bentuk kegiatan observasi mendalam pada objek-objek yang menjadi data dalam penelitian. Teknik pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka yang berarti peneliti melakukan kajian mendalam pada bacaan terdahulu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data penelitian menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang dalam penerapannya pada penelitian ini dilakukan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penentuan simpulan awal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal.

Secara garis besar penelitian ini menemukan bahwa tindakan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada program peningkatan minat baca masyarakat meningkat dengan adanya program Perpustakaan keliling yang dikerjakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut juga menunjukkan pemenuhan keenam aspek *Whole of Government* yang dipaparkan sebagai berikut:

(1) Koordinasi antar Organisasi

Menurut Ling, dalam Wibowo, (2022 :26), koordinasi antar organisasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh tim kerja dalam sebuah organisasi untuk melakukan tindak implementasi, memantau jalannya program, dan pengendalian program. Hal ini bermaksud dalam sebuah program kebijakan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi, sebuah tim memiliki peranan untuk merencanakan bentuk program yang akan dilaksanakan, melakukan pendataan mengenai kebutuhan pelaksanaan program dan juga melakukan pengendalian yang berarti tim juga memantau perkembangan dari program yang dilaksanakan. Selain itu tim juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan peningkatan kualitas program kebijakan yang dilakukan. Tindakan koordinasi organisasi juga dilakukan oleh tim Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ridho Prasetyo selaku kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam wawancara dengan peneliti yang mengungkapkan hasil berupa:

Peneliti: "Apakah pelaksanaan program kebijakan Perpustakaan Keliling yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan terkoordinasi dalam artian adanya persiapan pembentukan tim dan koordinasi dengan pihak-pihak lain?"

Narasumber: "Tentu saja, program Perpustakaan Keliling ini kan memiliki tujuan utama untuk menyelenggarakan peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Sidoarjo, yang

berarti target subyek kebijakan ini itu melibatkan banyak orang, dan banyak pihak, jadi saya sebagai perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo mengadakan perencanaan program dan juga koordinasi dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam program Perpustakaan Keliling ini."

Peneliti: "Bagaimana bentuk perencanaan program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam mengadakan program Perpustakaan Keliling?"

Narasumber: "Perencanaan program Perpustakaan Keliling yang kita gagas ini dimulai dengan desain program, dan menentukan sumber daya alat dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan program ini, Desain program ini berarti kita menentukan bagaimana bentuk kegiatan perpustakaan keliling yang kita adakan di lokasi-lokasi, apakah sekedar membaca saja, atau ada tambahan lain. Ternyata dari hasil perencanaan tersebut kami menemukan bentuk bahwa jika datang ke desa-desa maka bentuk program Perpustakaan Keliling hanya membuka gerai baca yang kemudian didatangi oleh warga desa, sedangkan kalau kami mengunjungi sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka akan ditambahkan kegiatan membaca buku bersama, dan pembacaan dongeng bagi siswa TK atau SD yang dibacakan oleh petugas perpustakaan dengan didampingi oleh pihak sekolah, sedangkan penentuan sumber daya alat maupun sumber daya manusia, kami menentukan dan memilah buku-buku yang akan dibawa ke lokasi, karena tiap lokasi yang dikunjungi tentu memiliki karakteristik pembaca yang berbeda. Hal ini berarti jika mengunjungi sekolah pada jenjang TK dan SD maka kami akan membawakan buku-buku dengan genre sastra anak, sedangkan ketika mengunjungi sekolah pada jenjang SMP dan SMA kami akan membawakan buku novel ataupun sains yang diminati oleh siswa pada usia tersebut, hal ini berbeda lagi ketika kami mengunjungi desa-desa, maka kami akan membawa buku umum atau resep masak, trik bertani, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan masyarakat desa."

Peneliti: "Lalu setelah dilaksanakan perencanaan program tersebut, bagaimana koordinasi antar organisasi dalam program ini dijalankan?"

Narasumber: "Untuk alur mekanisme koordinasi sendiri bervariasi ya, contohnya jika kunjungan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo, maka alurnya adalah pihak sekolah menghubungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo 7 hari sebelum jadwal kunjungan, dan mengatur persiapan acara yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Hal ini berarti pihak sekolah menghubungi kami duluan, berbeda dengan program perpustakaan keliling di desa-desa, kalau hal ini kebalikannya yang berarti kami (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo) menghubungi pihak Humas Desa untuk meminta izin pengadaan program Perpustakaan Keliling di desa tersebut pada tanggal tertentu, yang kemudian direspon oleh pihak desa dengan konfirmasi lokasi yang dapat digunakan untuk mengadakan program Perpustakaan Keliling seperti Lapangan Desa, Balai Desa atau lokasi lain yang memungkinkan."

Wawancara 1, Koordinasi Antar Organisasi dalam Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara 1 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada aspek koordinasi antar organisasi sebagai salah satu aspek Whole of Government menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo melibatkan tahapan persiapan program yang dilanjutkan dengan tindakan koordinasi dengan organisasi lain yang dilibatkan dalam

program Perpustakaan Keliling. Tindakan persiapan dilakukan dalam bentuk desain program dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program perpustakaan keliling. Tindakan koordinasi dengan organisasi lain dilakukan dengan pihak eksternal yang dilibatkan dalam program ini yakni sekolah-sekolah dan pemerintah desa yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas maka pada aspek koordinasi antar organisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan tindakan yang sesuai dengan paradigma Koordinasi Antar Organisasi menurut Wibowo, (2022), yang menyatakan bahwa diperlukan tindakan koordinasi sebelum program kebijakan organisasi dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, implementasi tindakan, dan umpan balik serta pengendalian. Hal tersebut ditunjukkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam program perpustakaan keliling yang mengadakan tindakan persiapan berupa penentuan sumber daya manusia dan sumber daya alat yang akan digunakan dalam implementasi program Perpustakaan Keliling. Selain itu juga dilakukan tindakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini yakni baik pihak sekolah maupun pemerintah desa yang menjadi lokasi program Perpustakaan Keliling dijalankan.

(2) Sharing Informasi

Menurut Wibowo, (2022), sharing informasi merupakan bentuk gambaran tim persiapan dalam melakukan komunikasi antar anggota yang terlibat dengan tujuan membangun adanya koneksi kerja yang harmonis satu sama lain. Hal tersebut memiliki muara tujuan ada terbangunnya paradigma kebersamaan yang bersifat membangun ke arah lebih baik pada aspek program yang dilaksanakan. Aspek sharing informasi juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ketika melaksanakan program perpustakaan keliling, yang ditunjukkan melalui hasil wawancara berikut ini:

Peneliti: "Bagaimana bentuk sharing informasi atau komunikasi yang dilakukan oleh pihak tim Perpustakaan Keliling dalam melaksanakan tugas kerjanya?"

Prasetyo (43): "jadi komunikasi yang kami lakukan dalam menjalankan program perpustakaan keliling ini kami golongan ke dalam dua jenis yakni komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak di dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini, termasuk saya, pihak humas, dan supir dari kendaraan Perpustakaan Keliling, kami mengadakan komunikasi untuk melakukan koordinasi mengenai jadwal kunjungan, lokasi yang ditargetkan akan menjadi lokasi Perpustakaan Keliling, serta kesiapan sumber daya alat termasuk buku dan sarana mobil yang digunakan. Komunikasi kedua yakni komunikasi eksternal dijalin dengan pihak eksternal seperti yang dijalankan tadi yakni dengan pihak sekolah maupun pemerintah Desa, komunikasi eksternal ini utamanya pada pihak sekolah menentukan bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah nantinya pada saat kunjungan Perpustakaan Keliling, seringkali pihak sekolah baik TK ataupun SD meminta untuk diadakan kegiatan mendongeng yang dibacakan oleh petugas kami kepada siswa di sekolah tersebut dalam metode ceramah ataupun demonstrasi, hal tersebut tentunya memerlukan kesiapan dari pihak Dinas ini untuk melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Jadi baik komunikasi internal maupun eksternal yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengemas program Perpustakaan Keliling ini sebagai kegiatan yang matang dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo"

Wawancara 2, Sharing Informasi dalam Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara 2 di atas dapat diinterpretasikan bahwa aspek sharing informasi antar anggota yang terlibat di program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini dibagi menjadi dua jenis yakni komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan oleh aktor kebijakan yang terdapat pada bagan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yang dalam wawancara menunjukkan keterlibatan tiga aktor kebijakan yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Sie Humas, dan Supir dari Mobil Perpustakaan Keliling. Komunikasi pada pihak internal tersebut bertujuan untuk mengagendakan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Perpustakaan Keliling, serta kesiapan sumber daya alat maupun manusia yang dibutuhkan untuk menuju lokasi tersebut. Komunikasi eksternal juga dilakukan sebagai bentuk persiapan implementasi program Perpustakaan Keliling yang melibatkan pihak-pihak di luar bagan internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan dalam bentuk komunikasi khususnya pada pihak sekolah yang meminta diadakan sesi acara mendongeng atau kegiatan tambahan lain oleh Perpustakaan Keliling, yang berarti memerlukan kesiapan lebih dari aktor kebijakan. Kedua jenis komunikasi ini bertujuan untuk mengadakan pengarah program Perpustakaan Keliling menjadi program berhasil dan mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian interpretasi tersebut maka aspek sharing informasi yang terjadi antara pihak internal dan eksternal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo linear dengan ungkapan Wibowo, (2022), mengenai aspek sharing informasi dalam paradigma Whole of Government yang menyatakan bahwa tujuan dari tindakan tersebut adalah membentuk hubungan kinerja jarmnis dan mengelbermuara pada tujuan untuk membangun program kebijakan menuju arah yang lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan program Perpustakaan Keliling yang menunjukkan tindakan konstruktif dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam program ini.

(3) Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi merupakan kompetensi yang dimiliki oleh para aktor kebijakan yang terlibat dalam implementasi program, (Wibowo, 2022). Hal ini berbicara mengenai kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi yang menciptakan keefektifan dalam kinerja organisasi, serta turut menjadi faktor keberhasilan kinerja. Kapasitas organisasi pada aktor-aktor yang terlibat pada program Perpustakaan Keliling disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini:

Peneliti: "Bagaimana dengan kinerja organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo yang juga dipengaruhi dengan kualitas Sumber Daya Manusia para aktor kebijakan dalam melaksanakan program Perpustakaan Keliling?"

Prasetyo (43): "Jadi memang kinerja organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini sama dengan organisasi lain, yang pastinya ditentukan dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang bertugas di dalamnya, dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas kinerja masing-masing dari kami itu menentukan keberhasilan

program termasuk Perpustakaan Keliling ini. Dalam organisasi ini (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo), ini rata-rata orang yang bekerja di sini merupakan lulusan sarjana dengan ilmu yang linear, contohnya saya sendiri dari IPDN jurusan Ilmu Pemerintahan, begitu juga dengan teman-teman lain yang berasal dari latar belakang ilmu yang berkaitan seperti administrasi publik, dan khususnya ilmu perpustakaan. Selain itu terkhusus dalam program perpustakaan keliling, kami juga melakukan pelatihan kepada staff-staff yang terlibat yakni dengan pelatihan program literasi dan sebagainya untuk menunjang kinerja mereka dalam menjalankan program perpustakaan keliling."

Wawancara 3, Kapasitas Organisasi dalam Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara 3 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kapasitas organisasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan kinerja secara keseluruhan dikatakan positif dikarenakan petugas atau aktor kebijakan yang terdapat pada berbagai kegiatan utamanya Perpustakaan Keliling memiliki aktor kebijakan yang kompeten dengan pembekalan dan pelatihan bidang kerja yang menunjang kinerja aktor kebijakan sehingga program yang dijalankan dapat mencapai target atau tujuan kebijakan. Hal tersebut menyiratkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo telah linear dengan ungkapan Wibowo, (2022), mengenai aspek kapasitas organisasi yang menyatakan bahwa target kebijakan dapat tercapai dengan ditunjang oleh kapasitas organisasi yang diisi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten sehingga kinerja yang dilakukan dapat efisien, dan terakomodir dengan baik.

(4) Fleksibilitas organisasi

Menurut Wibowo, (2022), fleksibilitas organisasi merupakan hal yang berbicara mengenai kemampuan anggota tim dalam sebuah organisasi untuk memainkan peran, serta pola kepemimpinan dari pimpinan organisasi tersebut. Penuturan Wibowo menyatakan bahwa untuk mencapai organisasi yang fleksibel diharuskan mengadakan gaya kepemimpinan yang berbagi dari pimpinan organisasi tersebut, yang disebut dengan *shared leadership*. Hal tersebut dapat menyebabkan dampak positif yakni adanya inovasi atau cara kerja baru untuk memecahkan masalah, serta orientasi pada luaran yang terkontrol. Pernyataan mengenai fleksibilitas organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo diungkapkan dalam hasil wawancara di bawah ini:

Narasumber: "Adakah gaya kepemimpinan yang bapak lakukan menghasilkan metode baru dalam kinerja, atau dapat dikatakan sebagai gaya kepemimpinan berbagi, dan jika ada apa dampaknya?"

Prasetyo (43): "Gaya kepemimpinan berbagai adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan distribusi tanggung jawab di antara anggota tim. Dalam konteks program Perpustakaan Keliling yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, gaya kepemimpinan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota, ide-ide inovatif dapat muncul, dan permasalahan operasional dapat diselesaikan lebih efektif. Selain itu, pembagian tanggung jawab memungkinkan setiap individu merasa lebih memiliki peran dalam keberhasilan program, sehingga meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Gaya kepemimpinan berbagi juga

mempermudah kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti sekolah, komunitas lokal, atau pihak swasta, untuk mendukung keberlanjutan dan jangkauan program. Dampaknya, Perpustakaan Keliling dapat berjalan lebih lancar, menjangkau lebih banyak masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan literasi di wilayah Sidoarjo"

Wawancara 4, Fleksibilitas Organisasi dalam Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara 4 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Ridho Prasetyo selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo merupakan pemimpin yang juga menerapkan gaya kepemimpinan berbagai atau *shared leadership*. Menurut McNutty, dalam Komariyah, (2006 :129), gaya kepemimpinan berbagi merupakan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin organisasi dalam bentuk memberikan keleluasaan kepada anggota organisasi untuk belajar dan memberikan saran terhadap kinerja organisasi. Hal tersebut juga diterapkan oleh Ridho Prasetyo dalam bentuk penitik beratan kinerja dalam bentuk kolaborasi, partisipasi dan tanggung jawab organisasi, yang berarti dalam menjalankan program kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, termasuk Perpustakaan Keliling terdapat aspek kolaborasi, partisipasi serta pembagian tanggung jawab antar anggota yang bertugas, sehingga kekurangan dan kelebihan satu sama lain dapat terakomodir dengan baik.

Berangkat dari pernyataan tersebut maka fleksibilitas organisasi pada program Perpustakaan Keliling yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan kelinearan dengan pernyataan Wibowo, (2022), mengenai fleksibilitas organisasi dalam paradigma Whole of Government yang ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan berbagi yang diterapkan oleh pimpinan organisasi yang bermuara pada terciptanya manfaat bagi tujuan peningkatan literasi pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

(5) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah dua komponen penting yang mendukung kelancaran suatu kegiatan atau program. Sarana merujuk pada alat, perlengkapan, atau fasilitas yang langsung digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas, seperti meja, kursi, komputer, atau kendaraan operasional. Sementara itu, prasarana mengacu pada infrastruktur atau fasilitas pendukung yang menjadi penunjang utama, seperti gedung, jalan, jaringan listrik, dan sistem komunikasi. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, di mana sarana berfungsi sebagai alat bantu pelaksanaan kegiatan, sedangkan prasarana memastikan bahwa sarana dapat digunakan secara optimal. Dalam berbagai bidang, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi atau program. Menurut Wibowo, (2022), sarana dan prasarana bagi sebuah organisasi dalam paradigma WoG juga perlu memperhatikan aspek manfaat sarana dan prasarana tersebut dalam menunjang kinerja tim, tanggung jawab organisasi dalam menjaga sarana dan prasarana tersebut, serta pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana tersebut bagi bergeraknya sebuah program yang digagas oleh organisasi. Pernyataan mengenai poin-poin pembahasan tersebut dipaparkan dalam hasil wawancara berikut ini:

Peneliti: "Bagaimana pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kelancaran program Perpustakaan Keliling yang dilakukan?, dan apa manfaat dari sarana prasarana tersebut?"

Prasetyo (43): "Ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan Perpustakaan Keliling yang kami adakan ini sangat krusial dikarenakan baik sarana atau prasarana menentukan keberhasilan, bahkan jangankan berhasil, jalan atau tidaknya program ya dari sarana prasarana. Sarana seperti perlengkapan yang berupa mobil keliling, buku-buku, dan juga hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan acara ini betul-betul kami perhatikan untuk mengadakan acara yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan, sedangkan untuk prasarana kami kerap mengalami kendala seperti penyelenggaraan perpustakaan keliling di desa-desa pelosok Kabupaten Sidoarjo yang memiliki akses jalan yang sulit, koneksi internet yang lemah, sehingga program perpustakaan keliling yang dilaksanakan di lokasi tersebut terkesan konvensional tanpa adanya inovasi berlebih yang membutuhkan jaringan internet dan akses jalan yang mumpuni."

Peneliti: "Bagaimana pemeliharaan alat-alat tersebut?"

Prasetyo (43): "Perawatan juga kami perhatikan dengan baik, karena bagaimanapun pemeliharaan atau maintenance itu juga penting, buat apa kita punya barang-barang atau sarana yang baik tapi dalam jangka waktu tertentu tidak dapat digunakan karena kondisinya yang tidak prima, untuk hal tersebut saya selalu menyampaikan kepada anggota yang lain untuk memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat fasilitas berupa alat maupun non-alat yang digunakan dalam program-program oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ini."

Wawancara 5, Aspek Sarana dan Prasarana dalam Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara 5 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penyediaan sarana berupa buku dan mobil keliling telah dipersiapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo untuk mengadakan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo khususnya pada bidang peningkatan kemampuan literasi, sedangkan kendala terdapat pada pra-sarana khususnya kegiatan Perpustakaan Keliling yang menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kendala akses jalan yang sulit, serta koneksi internet yang lambat sehingga terdapat kendala atau hambatan pada waktu, tenaga dan biaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek sarana dan pra-sarana yang digunakan dalam program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan aspek sarana dan pra-sarana yang disampaikan oleh Wibowo, (2022), yang menyatakan adanya tiga hal penting yakni pemeliharaan sarana dan prasarana, pengaruh keberadaan sarana dan prasarana, serta kebermanfaatannya dari sarana dan prasarana tersebut.

(6) Budget atau Keuangan

Budget atau keuangan dalam paradigma WoG menurut Wibowo, (2022), merupakan hal yang berbicara mengenai bagaimana penganggaran yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menjalankan sebuah program, dan pendanaan tersebut dapat bermanfaat bagi kegiatan yang dilakukan. Penganggaran yang dilakukan dalam program perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Sidoarjo tidak rumit, hal tersebut didapatkan peneliti melalui metode observasi yang menyatakan bahwa dalam kegiatan perpustakaan keliling anggaran hanya digunakan untuk dua hal yakni: (1) Transportasi, dalam hal ini bensin yang dalam sehari memakan biaya Rp 100.000,00 untuk mobil keliling, biaya tersebut dikeluarkan sesuai dengan jadwal keberangkatan perpustakaan keliling; (2) Biaya perawatan, hal ini mengenai perawatan buku seperti penyampulan dan pembersihan yang dilakukan dalam waktu dua minggu sekali yang memakan biaya Rp 30.000,00. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran yang digunakan dalam program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi kebutuhan anggaran kinerja dan mampu menghadirkan kegiatan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Diskusi

Hasil penelitian ini mengidentifikasi penerapan paradigma *Whole of Government* (WoG) dalam program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Paradigma WoG, yang berfokus pada koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, digunakan untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menunjukkan bahwa enam aspek WoG—koordinasi antar organisasi, berbagi informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas organisasi, sarana dan prasarana, serta penganggaran—telah diterapkan dalam program tersebut. Temuan mencatat keberhasilan program dalam meningkatkan minat baca masyarakat, meskipun kendala teknis seperti akses jalan dan koneksi internet masih menjadi tantangan.

Penelitian ini menggunakan teori WoG sebagai kerangka analisis yang menyoroti pentingnya kolaborasi antar aktor dan integrasi dalam pelayanan publik. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wibowo (2022), yang menggunakan paradigma WoG dalam konteks penyiapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perbedaan signifikan terletak pada fokus studi: penelitian ini mengkaji penerapan WoG pada layanan berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi, sementara penelitian Wibowo berfokus pada manajemen proyek berbasis kebijakan pengadaan lahan.

Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menunjukkan bagaimana WoG dapat diterapkan dalam konteks literasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis, sebagai studi kasus penerapan WoG dalam konteks baru, maupun praktis, dengan merekomendasikan solusi untuk mengatasi kendala teknis dan memperluas dampak program.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menjadi tantangan serius yang berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Sidoarjo, meskipun berada di Jawa Timur yang memiliki kota-kota dengan indeks literasi lebih tinggi seperti Surabaya, menunjukkan angka yang masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meluncurkan program Perpustakaan Keliling untuk meningkatkan minat

baca masyarakat. Program ini bertujuan menjangkau berbagai kalangan, baik melalui kunjungan ke sekolah-sekolah maupun desa-desa, dengan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan enam aspek paradigma WoG, yaitu koordinasi antar organisasi, *sharing* informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas organisasi, sarana dan prasarana, serta anggaran, memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan koordinasi yang baik dengan pihak sekolah dan desa, berbagi informasi secara efektif baik secara internal maupun eksternal, serta memberdayakan SDM yang kompeten. Gaya kepemimpinan berbagi diterapkan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam tim. Selain itu, kendala pada prasarana seperti akses jalan dan koneksi internet di daerah pelosok menjadi tantangan yang memengaruhi optimalisasi program. Penerapan paradigma WoG dalam program Perpustakaan Keliling di Kabupaten Sidoarjo berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan minat baca masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis, upaya inovatif dan kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif baru tentang penerapan WoG pada peningkatan literasi masyarakat melalui layanan berbasis komunitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A. R., Ipungkartti, A. A., & Saffanah, K. N. (2021). Pengaruh kurangnya literasi serta kemampuan dalam berpikir kritis yang masih rendah dalam pendidikan di Indonesia.
- Herwina, W. (2020). Peningkatan minat membaca warga belajar melalui kampung literasi di pkbm Al-hidayah Tasikmalaya. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 112-121.
- Komariyah, Y. (2006). Shared Leadership Sebagai Bagian Terintegritas Dalam Learning Organisation: Bisakah Kita Terapkan?. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(2), 03-03.
- LAN-RI. (2017). Whole Of Government, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta : LAN.
- Rahmadanita, A. (2022). Rendahnya literasi remaja di Indonesia: masalah dan solusi. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 8(2), 55-62.
- Shofaussamawati. (2014) Menumbuhkan Minat Baca dengan Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Sejak Dini. *Libraria*, Vol.2 No.1
- Suhadhan, I., Widyawati, T. I., Chumeidi, A., & Santi, F. (2023). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Di Provinsi Banten. *Journal Publicuho*, 6(3), 1055-1068.
- Utami, Iarasati diah. (2021). Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara.
- Wibowo, B. (2022). Penerapan Whole of Government (wog) Dalam Penyiapan Penlok Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tenga. *Jurnal Good Governance*, 18(1), pp 21-36